

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Menjelang pesta demokrasi pemilihan presiden 2019, kesadaran kaum perempuan untuk mengikutsertakan diri dalam perpolitikan mengalami peningkatan. Di tandai dengan munculnya pergerakan Barisan Emak-emak Militan Indonesia yang menuntut langsung ke Presiden Jokowi. Tuntutan Barisan Emak-emak Militan ini tidaklah jauh dari kebutuhan rumah, yaitu penurunan harga sembako, penurunan tarif dasar listrik pembatalan kenaikan harga LPG dan lebih jauh lagi mereka menyarankan Presiden Jokowi segera turun dari kursi jabatannya.

Kaum perempuan sudah mulai menyuarakan suaranya dengan lantang, pertama Neno Warisman sebagai aktivis #2019GantiPresiden tidak gentar berpidato melengseran Presiden Jokowi. Dan pada kasus Ratna Sarumpaet yang terbukti meyebaran berita bohong / *hoax* yang saat itu menjabat sebagai Tim Sukses Prabowo dan Sandiaga. Geliat perpolitikan para kaum perempuan ini menjadi trending/hangat di bicarakan pada media massa cetak maupun elektronik.

Ada lagi, Barisan Emak-Emak Militan Indonesia / BEMI yaitu sekelompok ibu-ibu yang awalnya resah dengan mahalnnya harga sembako, telur, bumbu dapur dan soal cabai yang harus ditanam sendiri. Dan akhirnya menggelar aksi di depan Istana Negara menuntut langsung ke Presiden terpilih 2015. Berbagai tuntutan Barisan Emak-emak Militan ini juga soal dapur, mulai dari penuntutan penurunan harga sembako, penurunan harga dasar listrik dan lebih jauh lagi mereka menyarankan Presiden pertahana turun dari kursi jabatannya, di kutip dari (Majalah Hukum dan Keadilan Indonesia,2018)



Banyak definisi tentang Emak-emak militan salah satunya adalah emak-emak militan sebagai unit kalangan ibu-ibu kelas menengah ke bawah. Ada juga yang mendefinisikan sebagai kaum ibu dengan rata-rata usia 35 hingga 50-an tahun yang mengalami hidup pada masa orde baru hingga masa reformasi dan sampai zaman teknologi. Dan emak-emak militan adalah pergerakan para kaum ibu kalangan menengah kebawah yang sadar akan kebutuhan dapur sampai politik (VOA Islam).

Barisan Emak-emak Militan ini melakukan aksi demo di depan Istana Negara. Mereka membawa sejumlah peralatan dapur seperti wajan, panci, sendok,

garpu dan lainnya. Dengan niatan menuntut langsung pada Presiden Jokowi. Ada juga barisan emak-emak militan lainnya yaitu Emak-emak Jokowi Militan Indonesia / EMJI pada 14 Agustus lalu mereka melaporkan aktivis #2019GantiPresiden Neno Warisman, Mardiani Ali Sera, dan Isa Anshari ke Badan Reserse Kriminal Polri Gambir, Jakarta Pusat atas dugaan tindak pidana ujaran kebencian (kompas.com).

Pro dan contra terjadi pada kelompok perempuan di Indonesia, massa yang mengatasnamakan Perempuan Milenial Indonesia (Permisi) menggelar aksi yang sama. Tuntutan penolakan penggunaan pelibatan ibu atau emak-emak di politik praktis pada pilpres 2019 dan khususnya gerakan bertanda tagar #2019GantiPresiden. Dalam aksinya, emak-emak dari Permisi ini membawa spanduk dan berbagi papan yang berupa sindiran terhadap emak-emak yang meminta Jokowi mundur dan juga kepada pasangan capres dan cawapres Prabowo-Sandi.

Hal ini terjadi bisa diakibatkan politikus perempuan yang sedikit membuat keluhan para kaum ibu menjadi tidak terealisasikan. Hal ini karena keterwakilan perempuan di bidang politik haruslah seimbang dengan laki-laki. Tetapi faktanya keanggotaan perempuan di politik sudah di atur oleh undang-undang pencalonan anggota perleman menisyaratkan keterlibatan perempuan minimal sebanyak 30%. Namun, dalam konteks Negara Republik Indonesia dalam partai politik yang bersangkutan hanyalah sekedar formalitas belaka saja (Agus, 2017).

Suparno dalam Agus, (2017) menyatakan urgensi partisipasi perempuan pada politik ada beberapa hal yang menyebabkan perempuan harus berpartisipasi

dalam kebijakan politik di Indonesia. *Pertama* hak-hak politik perempuan merupakan integralisasi dan tidak akan terpisahkan dari hak asasi manusia. Politik secara aktif berdampak juga penyumbangan-penyumbangan pemikiran sampai kepada kepekaan terhadap permasalahan politik yang sangat diperlukan. Itu sebabnya jika keterwakilan di lembaga politik di serahkan secara aktif kepada laki-laki akan menghasilkan kondisi bias gender karena sangat kecil peluang laki-laki yang bisa memperjuangkan keadilan untuk perempuan.

*Kedua*, perempuan merupakan dengan populasi terbanyak di dunia dan oleh sebab itu secara demokratis suara-suara perempuan harus di pertimbangkan. Juga pada demokrasi pandangan dari kelompok yang berbeda jenis kelamin harus di pertimbangkan dan diformulasikan dalam setiap kebijakan-kebijakan. *Ketiga*, partisipasi perempuan bisa diharapkan mencegah kondisi yang tidak menguntungkan perempuan dalam mengatasi masalah *stereotype* pada perempuan, diskriminasi dibidang hukum, kehidupan sosial kerja, dan yang paling penting eksploitasi yang terjadi pada perempuan. Dan di percaya akan tidak ada satu kelompok lagi orang yang dapat mengartikulasikan kepentingan dan kebutuhan perempuan.

*Keempat*, perempuan dalam pengambilan keputusan politik harus dapat berpengaruh pada pengambilan keputusan politik yang mengutamakan kedamaian bersama. Politik perempuan diharapkan akan membawa dampak keseimbangan yang mengatasi perkelahian dengan solusi demokrasi dan mengubah kompetisi menjadi kerja sama. Partisipasi perempuan dalam politik secara aktif baik pembentukan, keanggotaan kepengurusan, hingga keanggotaan di parlemen

diharapkan menyumbang pemikiran sampai dengan kepekaan terhadap permasalahan politik terutama pada isu-isu perempuan atau relasi perempuan lainnya, di dalam bentuk sosial, budaya, ekonomi, dan politik.

Realitanya selama ini keterwakilan perempuan di lembaga legislatif baik secara nasional maupun lokal sangat rendah. Selama pemilu masa Orde Baru secara nasional perempuan hanya terwakili tidak lebih dari 12%. Sementara itu di era reformasi hasil pemilu 1999 mencatat keterwakilan perempuan di lembaga legislatif merosot menjadi 9%, pemilu 2004 hanya terwakili sekitar 11% dan untuk pemilu 2009 di setiap kabupaten/kota tidak terdapat sama sekali anggota legislatif perempuan (Rafni,2010).

Menjelang pilpres 2019 perempuan dalam hal ini di wakili oleh kaum ibu atau emak-emak di gandeng oleh capres dan cawapres untuk menarik massa saat kampanye nanti berlangsung. Keikutsertaan perempuan dalam politik sekarang ini cenderung di manfaatkan oleh kaum laki-laki untuk mendapatkan suara.

Buktinya Prabowo sandi akan mencanangkan pembentukan partai baru yaitu BEMI Barisan Emak-emak Militan Indonesia yang tadinya turun kejalan berunjuk rasa atas mahalnya harga sembako dan peralatan dapur sekaligus menyarankan Presiden Jokowi agar turun dari kursi jabatannya (CNN Indonesia). Kaum perempuan yang di manfaatkan oleh Jokowi lebih berbaur politik praktis lagi. Kelompok bernama EMJI Emak Militan Jokowi Indonesia di ketuai oleh Pebby Magdalena melaporkan Neno Warisman tentang aktivitas masifnya mengkapanyekan aspirasi dengan tanda tagar #2019GantiPresiden. Menurutnya

#2019GantiPresiden merupakan tindakan meprovokasikan orang-orang agar tidak memilih kembali Jokowi menjadi Presiden.

Keresahan sekelompok ibu-ibu yang menyuarakan pendapatnya di depan Istana Negara kini menjadi bahan perpolitikan bagi capres dan cawapres Prabowo sandi. Dengan merencanakan membuat partai BEMI / Barisan Emak-emak Militan Indonesia yang menuntut untuk Presiden Jokowi turun dari kursi kepemimpinan. Sedangkan Emak Militan Jokowi kental dengan politik konstitusional yang sudah resmi menjadi relawan Pro-Jokowi gencar melaporkan ke Badan Reserse Kriminal Polri Gambir, Jakarta Pusat tentang dugaan tindak pidana ujaran kebencian yang di lakukan oleh Neno Warisman, Mardiani Ali Sera, dan Isa Anshari di kutip dari (kompas.com).

Di antara dua kubu yang mengeksploitasi isu perempuan dari kampanye mereka, isu emak-emak militan-lah yang dekat dengan pasar politik mereka. Hal ini tidak luput dari media, penggunaan media dilibatkan dalam hal ini. Media massa bersifat massif menjadi kekuatan dalam menyebarkan pesan komunikasi. Dengan mengeksploitasi pemberitaan perempuan atau emak-emak militant di media massa merupakan bentuk komodifikasi terhadap perempuan. Seperti, artikel yang di muat pada media Hukum dan Politik Keadilan Indonesia. Media ini "Hukum dan Politik Keadilan Indonesia" ikut berperan menjadikan perempuan sebagai objek pemberitaan. Objek pemberitaan majalah tersebut ialah kaum ibu atau emak-emak, menceritakan tentang kedua kubu emak-emak pendukung Prabowo dan emak-emak pendukung Jokowi. Kedua pihak masing-masing memiliki cara yang berbeda untuk menjatuhkan para lawan politiknya. BEMI

Barisan Emak-emak Militan Indonesia, turun kejalan-jalan berunjuk rasa berorasi meneriaki agar Presiden Jokowi turun dari kursi kepemimpinannya. Sedangkan EMJI Emak Militan Jokowi Indonesia, bergelut dengan hukum agar bisa memenjarakan para aktivis #2019GantiPresiden yang terus mengkampanyekan pengleseran Presiden terpilih 2014 lalu.

Kecurigaan muncul terhadap isu-isu politik emak-emak militan ini dilatarbelakangi karena diangkatnya oleh media massa. Faktanya, perempuan dari berbagai daerah dan latar belakang agama maupun sosial ekonomi menghadapi sejumlah tantangan dan keterbatasan, dalam hal partisipasi mereka di ranah publik. Hambatan yang paling mendasar dihadapi oleh kaum perempuan ketika akan memasuki ranah publik justru datang dari pemisahan wilayah antara publik dan privat. Ideologi pemisahan tenaga kerja berdasarkan jenis kelamin atau gender menentukan perempuan sebagai seorang warga negara yang bersifat rahasia dengan peran utama di dalam rumah tangga sebagai ibu dan istri (Anggaunita, 2016).

Sementara laki-laki di berikan peran yang lebih produktif di muka publik. Ideologi peran gender membuat kontribusi perempuan di ranah publik tidak lagi terlihat. Peran mereka tidak di akui secara sosial, sehingga semakin sedikit sumber daya yang di investasikan pada perempuan sebagai sebuah modal (human capital) baik oleh keluarga maupun negara. Perempuan maupun emak-emak memiliki kekurangan dalam hal kekuasaan sosial bermasyarakat maupun ekonomi semakin sulit untuk masuk ke ranah politik yang didominasi oleh kaum lelaki. Tetapi, pada negara demokrasi ini pada hakikatnya kebebasan hanya dapat di

jamin bila kedewasaan, kesederajatan politik semua individu. Kesederajatan ini bukan saja menjamin lingkungan sosial yang aman tempat orang akan bebas memenuhi kegiatan dan kepentingan individu mereka (Ebyhara, 2013).

Eksplorasi dan perebutan hak-hak perempuan di Indonesia menuntut perempuan untuk tidak berpartisipasi di ranah politik maupun pemerintahan, dan politik di anggap sebuah ranah yang prerogatif milik laki-laki. Meskipun konteks sosial budaya di Indonesia beragam dan perempuan menghadapi berbagai keterbatasan yang berbeda. Berdasarkan hambatan umum yang di hadapi oleh seluruh perempuan di Indonesia ini karena peran serta tanggung jawab domestik. status subordinasi dalam hubungan gender dan perilaku sosial yang bersifat patriarkis terhadap partisipasi mereka di ranah publik (Hadianti, Abdullah, & Wening, 2013).

Ketika hal ini terjadi, maka timbulah suatu subjektivitas dimana perempuan yang terjun ke dunia politik di anggap telah melawan kodratnya sebagai perempuan. Rendahnya perwakilan perempuan di parlemen itu dianggap bahwa selama ini politik masih berwajah maskulinitas, sehingga politik tidak peka gender. Dalam perkembangannya sampai dengan saat ini bisa mengarah kepada generalisasi bahwa perempuan di Indonesia di anggap tidak begitu penting dan strategis untuk memasuki ranah politik (Agus, 2017).

Agus (2017) juga menyatakan, perempuan masih di perlakukan sebagai warga negara kelas dua, di batasi haknya dalam ikut serta mengambil keputusan kolektif serta *steril* dari posisi-posisi strategis dalam masyarakat. Ketika politik dimaknai dengan kegiatan pengambilan keputusan di ruang publik yang

berdampak kepada masyarakat banyak, maka asumsi menyatakan perempuan tidak boleh turun serta di dalamnya adalah asumsi yang sudah tidak lagi relevan.

Berdasarkan penjelasan di atas, perempuan dalam dunia politik di paparkan oleh media merupakan suatu bentuk komodifikasi perempuan yang sebenarnya dilatarbekangi ideologi patriak dengan melakukan marginalisasi terhadap perempuan. Selama ini wanita selalu di marginalisasikan dalam media massa baik media massa konvensional maupun elektronik. Perempuan sebagai subordinat dengan mengangkat isu perempuan politik pilpres 2019 seolah-olah perempuan memiliki suara yang berpengaruh dalam politik. Namun demikian, perempuan dimanfaatkan atau dikomodifikasi untuk menarik perhatian masyarakat.

## 1.2 Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti mendapatkan fokus penelitian permasalahan yang akan diteliti sebagai berikut ;

1. Konstruksi wacana gender dalam teks berita Politik Emak-emak Militan di terbitkan oleh majalah Hukum dan Politik Keadilan Indonesia.
2. Isu politik emak-emak militan pada majalah Hukum dan Politik Keadilan Indonesia.
3. Perempuan dikomodifikasi oleh pemangku politik untuk mendapatkan suara, melalui media massa, yaitu pemberitaan “Emak-Emak Militan”

dimana mengandung budaya patriarki yang menyudutkan kaum perempuan atau emak-emak.

4. Penelitian ini bertujuan membongkar atau membuktikan hal tersebut dengan menggunakan model analisis wacana Sarah Mills.

### 1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah, maka dapat peneliti rumuskan masalah yaitu, bagaimana konstruksi wacana gender dalam teks berita Politik Emak-emak Militan yang di terbitkan oleh majalah Hukum dan Politik Keadilan Indonesia edisi 29, 27 Agustus - 9 September 2018 ?

### 1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana konstruksi gender dalam teks berita Politik Emak-emak Militan yang di terbitkan oleh majalah Hukum dan Politik Keadilan Indonesia edisi 29, 27 Agustus – 9 September 2018.

### 1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan tentang perempuan yang juga membahas isu-isu perempuan yang tedahulu. Dan banyak lagi manfaat yang di dapat oleh para pembaca.

1. Dalam aspek teoritis berguna sebagai penelitian bahan kajian dalam penelitian sejenis, dan pengembangan ilmu berspektif feminisme. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi wawasan baru kepada ilmuan komunikasi dalam bidang analisi wacana, khususnya pada kajian analisis wacana kritis Sara Mills yang di terapkan untuk menganalisis berita dalam media cetak. Serta memberikan kajian ilmu komunikasi dan mempermudah jalanya komunikasi antara komunikator dan komunikan.
2. Dalam aspek praktis berguna untuk menyadari kaum perempuan agar mengetahui kebutuhan dan hak-hak perempuan dalam bermasyarakat. Juga mengurangi terjadinya bias-bias di dalam teks majalah-majalah di media massa lain maupun serupa.